

Implementasi Entrepreneur Government Dalam Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo (Studi Di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Gorontalo)

Ferdi S. Gani

Abstract

Upaya merespon dinamika masyarakat dan berbagai tuntutan tersebut lahirilah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah direvisi lagi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Keberadaan undang-undang ini memberikan kewenangan yang besar pada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan menawarkan berbagai kemungkinan untuk diterapkannya paradigma baru dalam menata kembali sistem pemerintahan daerah dan menemukan cara-cara baru dalam menjalankan birokrasi publik dengan efisien, efektif, responsif, transparan dan akuntabel terhadap kebutuhan masyarakat. Aparat birokrasi yang belum mengerti tentang apa itu *entrepreneur government*, ditinjau dari aspek *customer oriented* untuk adanya *citizen carter*, Aspek Efisiensi Anggaran, Aspek Inovasi dan Kreatifitas, Aspek Kompetitif dalam Penyelenggaraan Pelayanan, apalagi untuk menerapkannya akan menimbulkan suatu pemerintahan yang tidak sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Sosialisasi dari prinsip *entrepreneur government* ini semestinya sering dilakukan guna memenuhi kebutuhan akan pengetahuan sumber daya manusia aparat birokrasi. Untuk menambah pengetahuan tersebut aparat birokrasi diberikan kesempatan untuk mengikuti acara-acara yang membahas konsep-konsep pemerintahan yang bergaya wirausaha.

Kata Kunci :

Entrepreneur Government, Birokrasi Pemerintah, Kabupaten Gorontalo

PENDAHULUAN

Gerakan reformasi yang digulirkan mahasiswa dengan jatuhnya rejim Soeharto bertujuan untuk menata ulang kehidupan berbangsa dan bernegara. Gerakan reformasi diharapkan menjadi jalan bagi penyelesaian permasalahan bangsa yang dihadapi dan menjadi harapan bagi masyarakat sebagai momentum untuk menemukan cara baru dalam mendesain jalannya roda pemerintahan, baik yang menyangkut dimensi kehidupan politik, sosial, ekonomi maupun kultural. Gerakan Reformasi menuntut adanya perubahan struktur, kultur dan paradigma penyelenggaraan pemerintahan terutama birokrasinya.

Hal ini merupakan kebutuhan mendesak untuk segera dilakukan mengingat birokrasi pemerintahan mempunyai kontribusi yang besar terhadap terjadinya krisis multi dimensional yang terjadi selama ini.

Dalam upaya merespon dinamika masyarakat dan berbagai tuntutan tersebut lahirilah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah direvisi lagi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Keberadaan undang-undang ini memberikan kewenangan yang besar pada daerah untuk mengurus rumah

tangganya sendiri dan menawarkan berbagai kemungkinan untuk diterapkannya paradigma baru dalam menata kembali sistem pemerintahan daerah dan menemukan cara-cara baru dalam menjalankan birokrasi publik dengan efisien, efektif, responsif, transparan dan akuntabel terhadap kebutuhan masyarakat. Daerah dapat mengembangkan kehidupan demokrasi, peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat serta terpeliharanya nilai-nilai keanekaragaman daerah yang pada akhirnya pemerintah daerah dapat menentukan desain dan model birokrasi publik yang tepat untuk merespon tuntutan, aspirasi dan dinamika yang terjadi di masyarakat. Kegagalan dalam merespon tuntutan perubahan itu bisa menciptakan sumber konflik baru antara pemerintah dengan masyarakat yang pada akhirnya bisa mengganggu legitimasi dan jalannya roda pemerintahan.

Perubahan birokrasi publik yang diperkenalkan para teorisi tersebut merupakan perubahan birokrasi publik melalui pendekatan NPM (New Public Management) sebagai paradigma baru dalam upaya 'mentransformasi birokrasi yang kaku, hirarkis, pejabatis bentuk administrasi publiknya menjadi suatu birokrasi yang fleksibel dan berorientasi pasar -pengguna jasa / pelanggan- bentuk manajemen publiknya' (Hughes, 1994,1).

Pendekatan NPM ini bila ditarik benang merahnya (Hughes, 1994, Ferlie, et.al, 1996, Osborne dan Gaebler, 1992) menghendaki suatu birokrasi publik yang memiliki kriteria *Good Governance* dan *Entrepreneur Government* dengan kemampuan memacu kompetisi, akuntabilitas, responsif terhadap perubahan, transparan, berpegang pada aturan hukum, mendorong adanya partisipasi pengguna jasa, mementingkan kualitas, efektif dan efisien, mempertimbangkan rasa keadilan bagi seluruh pengguna

jasa, dan terbangunnya suatu orientasi pada nilai-nilai untuk mewujudkan *Good Governance* dan *Entrepreneur Government* itu sendiri. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah "Implementasi *Entrepreneur Government* Di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Gorontalo

Entrepreneur Government (Pemerintahan bergaya Wirausaha)

Entrepreneur Government adalah suatu birokrasi pemerintahan yang memiliki jiwa dan semangat kewirausahaan dengan karakteristik berorientasi pada kebutuhan masyarakat (customer oriented), efisien, inovatif, responsive dan kompetitif dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Setiap pejabat birokrasi memiliki kompetensi yaitu pemahaman dan pengetahuan pejabat pemerintah daerah kabupaten terhadap ide dan konsep dari Entrepreneur Government. Kompetensi Birokrat yaitu kecakapan dan kemampuan yang dimiliki oleh birokrat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat pelaksanaan birokrasi tidak luput dari Budaya Birokrasi adalah sistem atau seperangkat nilai yang memiliki, simbol, orientasi nilai, keyakinan, dan pengetahuan yang diaktualisasikan kedalam sikap, tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh setiap birokrat.

Entrepreneur Government yang berorientasi pada masyarakat (customer oriented) dapat diukur dengan menggunakan indikator. (1) Ada tidaknya mekanisme mendengarkan suara dan keluhan masyarakat seperti customer carter. (2) Kebebasan masyarakat dalam memilih penyedia jasa dibidang sosial dan ada tidaknya peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan pemerintah kabupaten. (3) Ada tidaknya keikutsertaan masyarakat

dan swasta dalam kegiatan pelayanan publik seperti kemitraan dan privatisasi. (4) Ada tidaknya program dan institusi pemda yang memberdayakan masyarakat seperti forum bersama. (5) Efisiensi dalam penggunaan anggaran dapat diukur dengan : (a) Ada tidaknya pengukuran kinerja dari dinas dan kantor yang ada. (b) Alokasi anggaran yang didasarkan pada kinerja dinas atau kantor. (c) Sistem insentif berdasarkan pada kinerja dari dinas maupun kinerja pegawai. (d) Inovasi dan kreatifitas dapat diukur dengan pengembangan alternatif sumber pelayanan yang dilakukan oleh pemda untuk masyarakat seperti kemitraan dengan pihak swasta, Ada tidaknya mekanisme untuk tidak mensakralkan peraturan seperti, Sunset Law (undang-undang matahari terbenam) dan Review Commissions (komisi peninjauan) seperti pembatasan waktu berlakunya sebuah peraturan yang dilakukan oleh sebuah komisi, Ada tidaknya penerapan Manajemen Strategis dalam kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah seperti penyusunan rencana strategis disetiap unit organisasi pemda, Ada tidaknya pengembangan organisasi yang lebih flat, matriks dan team work yang dilakukan pemda terutama dalam penyusunan struktur organisasi pemda di era otonomi, Kegiatan pemerintah daerah dalam mencari profit dan sumber pendapatan yang baru.

Kewirausahaan dikenal sebagai suatu proses penciptaan nilai dengan menggunakan berbagai sumber daya tertentu untuk mengeksploitasi peluang (Lupiyoadi,1999:10). Konsep kewirausahaan telah mendapat perhatian yang sangat luas dan intensif dikalangan pakar akademis maupun dikalangan praktisi baik ekonomi, manajemen bisnis serta para birokrat yang bergerak disektor publik. Kewirausahaan dianggap sebagai obat yang mujarab dan sesuatu yang manjur

pada saat produktifitas, kreatifitas dan performansi dipentingkan (Goodman,1993:42).

David Osborne dan Ted Gaebler (1997) dengan karyanya yang monumental "Reinventing Government, How the Entrepreneur Spirit is Transforming the Public Sector" mencoba untuk menemukan kembali pemerintahan dengan mengembangkan konsep pemerintahan yang bergaya wirausaha (Entrepreneur Government). Esensi dasar yang sangat strategis dari pemikiran Osborne dan Ted tersebut berkaitan erat dengan birokrasi pemerintahan yang tidak lagi berorientasi pada budaya sentralisasi, strukturalisasi, formalisasi dan apatistik melainkan pada desentralisasi pemberdayaan, kemitraan, fungsionalisasi dan demokratisasi. Fungsi pemerintahan yang modren strateginya harus diarahkan pada daya dukung dan daya dorong untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam dalam proses kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Menurut Dwiyanto (1996) Reinventing Government adalah suatu pemikiran dan gerakan untuk mengembangkan pemerintah yang memiliki jiwa dan semangat entrepreneur. Ciri penting dari pemerintah yang entrepreneur adalah kemampuannya menggunakan resources yang ada secara efisien, inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya. Pemerintah hanya akan bisa mengembangkan semangat entrepreneur jika membuang jauh-jauh sifat dan mental birokratis yang selama ini mengangganginya. Karakteristik birokrasi pemerintah yang sentralistik, hirarkhis, monopolistik, reaktif dan formalistik harus diganti dengan desentralistik, organik-adaptif, kompetitif, antisipatif dan partisipatif.

Osborne dan Gaebler (1996) mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip

pemerintahan wirausaha yaitu : (1) Pemerintahan Katalis (Mengarahkan Ketimbang Mengayuh). (2) Pemerintahan katalis menghendaki peran pemerintah sebagai aktor dan pelaksana urusan publik perlu dikurangi dan pemerintah sebagai pengarah serta memusatkan paranannya dalam membuat kebijakan, peraturan dan undang-undang. (3) Pemerintahan Milik Masyarakat (Memberi Wewenang Ketimbang Melayani). Pemerintahan milik masyarakat diartikan sebagai pengalihan wewenang kontrol pemerintah ketangan masyarakat dan adanya perubahan misi dari pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat dan bukan sebagai pelayanan sehingga fungsi utama dari pemerintah adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil kendali atas penyelenggaraan pelayanan publik. (4) Pemerintahan Yang Kompetitif (Menyuntikkan Persaingan Ke Dalam Pemberian Pelayanan). Pemerintahan kompetitif mensyaratkan persaingan diantara para penyampai jasa atau pelayanan untuk bersaing berdasarkan kinerja dan harga. Pemerintah dikenal sangat monopolistik dalam menyelenggarakan urusan publik, akibatnya terjadi inefisiensi, kelambanan dan buruknya kualitas pelayanan. Untuk itu pemerintah harus mampu merangsang, mendorong dan menciptakan sistem kompetisi antar berbagai pelaku yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. (5) Pemerintahan Yang Digerakkan Oleh Misi (Mengubah Organisasi Yang Digerakkan Oleh Peraturan). Pemerintah yang berorientasi misi dilakukan dengan deregulasi internal, menghapus banyak peraturan internal dan secara radikal menyederhanakan sistem administrasi seperti anggaran memberikan pandangannya tentang perencanaan strategis yang harus dimiliki oleh organisasi nirlaba dengan berawal dari

adanya misi yang jelas, hal ini dimaksudkan karena sistem perencanaan lama tidak mampu lagi merespon perubahan yang terjadi begitu cepat. Pemerintah hanya bisa adaptif dan responsif terhadap dinamika yang terjadi dalam masyarakat, kalau pemerintah berorientasi pada misi. (6) Pemerintahan berorientasi pada hasil (Membiayai Hasil Bukan Masukan). Pemerintahan yang goal-oriented mengubah fokus dari input menjadi akuntabilitas pada output atau hasil, mengukur kinerja organisasi publik, menetapkan target, memberi imbalan kepada organisasi yang mencapai atau melebihi target. (7) Pemerintahan berorientasi pada pelanggan (Mematuhi Kebutuhan Pelanggan Bukan Birokrasi). Pemerintahan berorientasi pelanggan memperlakukan masyarakat yang dilayani sebagai pelanggan, menetapkan standar pelayanan, memberi jaminan. Dengan masukan dan insentif ini, mereka meredesain organisasinya untuk menyampaikan nilai maksimum kepada pelanggan. (8) Pemerintahan Wirausaha (Menghasilkan Ketimbang Membelanjakan). Pemerintah wirausaha menfokuskan energinya bukan sekadar untuk menghabiskan anggaran, tetapi juga menghasilkan uang. Mereka meminta masyarakat yang dilayani untuk membayar, menuntut return of investmen. Mereka memanfaatkan insentif seperti dana usaha dan dana inovasi untuk mendorong para pimpinan badan pemerintah berpikir mendapatkan dana operasional. (9) Pemerintah Yang Antisipatif (Mencegah Daripada Mengobati). Pemerintahan yang antisipatif adalah pemerintahan yang berpikir kedepan, mencoba mencegah timbulnya masalah daripada memberikan jalan untuk menyelesaikan masalah. Mengadopsi pemikiran Bryson (2001) bahwa salah satu cara mengantisipasi masa depan dengan menggunakan perencanaan

strategis, penetapan visi dan misi masa depan dan berbagai metode lain untuk menetapkan masa depan. (10) Pemerintahan Desentralisasi (Dari Hirarki Menuju Partisipasi Dan Tim Kerja). Untuk mewujudkan pemerintahan yang desentralisasi perlu dikembangkan manajemen partisipatif. Kewenangan pembuatan keputusan harus didesentralisasikan kepada unit-unit lokal yang lebih menguasai masalah dan memahami aspirasi masyarakat. Birokrasi yang hirarkhis harus diganti dengan tim kerja. Birokrasi pemerintah pada umumnya sangat hirarkhis dan sentralistik, hal ini menyebabkannya menjadi tidak adaptif dan inovatif. Model birokrasi semacam ini tidak dapat lagi dipertahankan dalam menghadapi perubahan dan dinamika serta kompleksnya kebutuhan masyarakat saat ini. (11) Pemerintah Berorientasi Pasar (Mendongkrak Perubahan Melalui Pasar). Penyelenggaraan pelayanan publik pada umumnya lebih sering menggunakan mekanisme administratif daripada mekanisme pasar. Mekanisme administratif seringkali memiliki banyak kelemahan seperti mahal, lamban dan tidak berkualitas. Sebaliknya mekanisme pasar karena sifatnya yang terbuka dan kompetitif cenderung lebih berhasil dalam menyediakan pelayanan yang murah, responsive dan inovatif.

Menerapkan Kewirausahaan Dalam Birokrasi

Dengan entrepreneur government, sebuah pemerintahan yang mempunyai kebiasaan menggunakan sumber daya dengan cara baru untuk mempertinggi efisiensi dan efektivitas kinerja serta pelayanan terhadap masyarakat, dan pada akhirnya akan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pengelolaan pemerintahan dengan model entrepreneur government akan memungkinkan pemerintah dan

masyarakat untuk mengelola sumber-sumber ekonomi yang lebih efektif dan efisien guna mengejar ketertinggalan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Untuk menggerakkan dan membuat Kabupaten Gorontalo lebih maju, maka prinsip entrepreneur government adalah model alternatif untuk percepatan pembangunan Kabupaten Gorontalo ke depan. Itu juga sesuai dengan gaya dan model reiventing government yang sedang dikembangkan dewasa ini.

Faktor-Faktor Yang Menentukan Keberhasilan Entrepreneur Government Dalam Birokrasi

- a. Kompetensi Birokrat
Kompetensi berasal dari bahasa inggris yaitu *competence* yang secara sederhana berarti kecakapan, kemampuan dan ketangkasan (John M.Echols dan Hasan Shadily,1992:132). Menurut pengertian ini terlihat bahwa kompetensi berhubungan dengan sesuatu kemampuan yang harus dimiliki seseorang berupa kualitas yang terdiri dari keahlian dan ketrampilan. Selanjutnya menurut Moenir (2000) yang dimaksud dengan kemampuan dalam hubungannya dengan pekerjaan adalah suatu keadaan pada seseorang yang secara penuh kesungguhan berdaya guna dan berhasil guna melaksanakan pekerjaan, sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal. Keadaan yang dimaksud menuntut adanya kualitas yang harus dimiliki seorang birokrat.
- b. Budaya Birokrasi
Seperti yang dikatakan oleh Edgar H. Schein (1992 :12) kultur merupakan pola asumsi dasar bersama yang dipelajari oleh kelompok dalam suatu organisasi sebagai alat untuk memecahkan

masalah terhadap penyesuaian faktor eksternal dan integrasi faktor internal, dan telah terbukti sah, dan oleh karenanya diajarkan kepada para anggota organisasi yang baru sebagai cara yang benar untuk mempersepsikan, memikirkan dan merasakan dalam kaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi itu. David Osborne dan Peter Plastrik (2000 : 260) mengemukakan faktor yang membentuk budaya organisasi: 1. Tujuan, 2. Sistem Insentif, 3. Sistem pertanggung jawaban, 4. Struktur kekuasaan, 5. Sistem Administrasi, 6. Struktur organisasional, 7. Proses kerja, 8. Tugas organisasional, 9.

Lingkungan Eksternal, 10. Riwayat dan tradisi, 11. Praktek manajemen, 12. Predisposisi Pemimpin, 13. Predisposisi Pegawai.

Osborne dan Plastrik (2000) mengemukakan beberapa strategi yang harus diperhatikan untuk dapat menuju pemerintahan yang bergaya wirausaha yaitu :

- (1) Strategi Inti.
- (2) Strategi Konsekuensi.
- (3) Strategi Pelanggan.
- (4) Strategi Pengendalian.
- (5) Strategi Budaya

Strategi yang telah dikemukakan tersebut dapat di sedarkanakan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1
Lima Strategi

Lima Strategi		
Pendongkrak	Strategi	Pendekatan
Tujuan	Strategi inti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejelasan Tujuan 2. Kejelasan Peran 3. Kejelasan Arah
Insentif	Strategi Konsekuensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persaingan Terkendali 2. Manajemen Perusahaan 3. Manajemen Kinerja
Pertanggungjawaban	Strategi Pelanggan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pilihan Pelanggan 2. Pilihan Kompetitif 3. Pemastian Mutu Pelanggan
Kekuasaan	Strategi Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan Organisasi 2. Pemberdayaan Pegawai 3. Pemberdayaan Masyarakat
Budaya	Strategi Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghentikan Kebiasaan 2. Menyentuh Perasaan 3. Mengubah Pikiran

Sumber: (Osborne dan Plastrik, 2000: 44).

- a. Kompetitif dalam penyelenggaraan pelayanan publik
 - a) Ada tidaknya kompetisi antar berbagai pelaku dan tingkatan yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat di kabupaten
 - b) Ada tidaknya kebijakan dan program pemda yang mendorong pengembangan semangat kompetisi.
 - c) Ada tidaknya Sistem insentif yang dibangun pemda baik terhadap pegawai maupun dinas dan kantor yang ada
- b. Kompetensi Birokrat adalah kecakapan dan kemampuan yang dimiliki oleh birokrat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya akan diukur dari: (1) Tingkat kecakapan dan ketrampilan birokrat dalam bekerja dan menyelesaikan masalah yang ada. (2) Kemampuan pejabat pemda dalam melakukan kerjasama antar unit, bagian dan dinas atau instansi dalam pelaksanaan tugas. (3) Kemampuan dalam menyusun rencana kegiatan. (4)Tingkat kreatifitas dan inovasi yang dilakukan pejabat pemda dalam melaksanakan tugas
- c. Sosialisasi adalah proses belajar untuk mengetahui dan mengenal sesuatu yang terefleksi kedalam, sikap dan tingkah laku seseorang yang dapat diukur dari: (1) Intensitas diklat, seminar dan workshop yang diikuti oleh pejabat pemda yang berhubungan dengan penerapan konsep *Entrepreneur Government*. (2) Banyaknya waktu yang digunakan dalam mengenalkan konsep *Entrepreneur Government* pada pejabat pemda. (3)Ada tidaknya kegiatan untuk mengenalkan konsep *Entrepreneur Government* yang dilakukan oleh pemda
- d. Budaya Birokrasi adalah sistem atau seperangkat nilai yang memiliki, simbol, orientasi nilai, keyakinan, pengetahuan dan pengalaman kehidupan yang terinternalisasi kedalam pikiran, seperangkat nilai yang diaktualisasikan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh setiap birokrat. Hal ini dapat diukur dari : (1) Bentuk dan tingkat hubungan antara atasan dengan bawahan dalam organisasi pemda seperti hirarki, bentuk penghormatan pada atasan. (2) Etos kerja dan motivasi para pejabat pemda dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. (3)Bahasa atau komunikasi yang dikembangkan oleh pejabat pemda dengan bawahan seperti menghargai perasaan orang lain, tidak asal menyalahkan dan pengungkapan ucapan selamat.

Pembahasan

Pemahaman Pejabat Tentang Entrepreneur Government di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Gorontalo

a. Aspek *Costumer Oriented*

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, masih banyak aparat birokrasi yang belum mengerti tentang apa itu *entrepreneur government*, ditinjau dari aspek *customer oriented* untuk adanya *citizen carter*. Dari ungkapan tersebut dapat diartikan bahwa masih ada keragu-raguan dan ketidak mengertian dari pegawai tentang *citizen carter* itu sesungguhnya. Selain itu mereka masih menganggap masyarakat belum siap dan tidak dewasa dalam menyikapi perubahan dalam hal pelayanan publik.

b. Aspek Efisiensi Anggaran

Dari data dan keterangan responden serta hasil observasi dilapangan terlihat bahwa sebagian besar pejabat sudah mengetahui sedikit banyaknya mengenai anggaran yang berbasis kinerja. Tetapi banyak juga yang tidak mengetahui apalagi untuk menerapkannya, dikarenakan berbagai hal terutama yang menyangkut dengan komplik kepentingan.

c. Aspek Inovasi dan Kreatifitas

Pemerintah perlu membuat rencana-rencana strategis dalam setiap kebijakan dan program-program. Ide perlunya setiap pemerintah daerah mempunyai rencana strategis dalam perencanaan pembangunannya menggantikan model REPELITA gaya orde baru mulai dilaksanakan sejak berlakunya otonomi daerah.

d. Aspek Kompetitif dalam Penyelenggaraan Pelayanan

Kompetitif dan daya saing, itulah ungkapan yang sering kita dengar, memang saat ini hal itu tak dapat ditawar-tawar lagi jika kita tidak kompetitif kita akan ketinggalan. Agak pesimis memang, bila pemerintah, swasta dan masyarakat kita belum siap menghadapi pasar bebas. Dibidang pelayanan publik kita tertinggal jauh dari singapura dan Malaysia.

Faktor-Faktor Yang Menjelaskan Entrepreneur Government Dalam Persepsi Pejabat Birokrasi

a. Aspek Pengetahuan Dan Sikap Terhadap Entrepreneur Government

Pada dasarnya konsep tentang *Entrepreneur Government* ini bisa diterapkan kedalam birokrasi di Indonesia. Masalahnya adalah apakah para birokrat dan masyarakat kita sudah siap dengan konsep tersebut. Pengaplikasian konsep *Entrepreneur Government*

perlu dimodifikasi sesuai dengan konteks birokrasi di Indonesia..

b. Aspek Kompetensi

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa inovasi masih merupakan sebuah "*uthopia*" bahkan menjadi momok yang menakutkan jika tidak ingin dicap sebagai aparat pembangkang yang tidak loyal dan taat kepada atasan dan aturan formal yang ada. Sehingga melahirkan istilah "*hidup segan mati tak mau*" dimana pada prinsipnya jajaran birokrasi ingin melakukan yang terbaik bagi peningkatan pelayanan akan tetapi karena tersandung oleh keberadaan aturan formal dan loyalitas buta kepada atasan dan aturan formal membuat mereka tidak bisa berbuat banyak.

c. Aspek Sosialisasi Dari Prinsip *Entrepreneur Government*

Aspek sosialisasi dari prinsip *Entrepreneur Government* ini semestinya sering dilakukan guna memenuhi kebutuhan akan pengetahuan sumber daya manusia aparat birokrasi. Untuk menambah pengetahuan tersebut aparat birokrasi diberikan kesempatan untuk mengikuti acara-acara yang membahas konsep-konsep pemerintahan yang bergaya wirausaha.

d. Aspek Budaya

Pemerintahan yang bergaya wirausaha tidak memberikan tempat pada budaya paternalistik, hirarki yang kaku dan terpaku pada aturan-aturan yang permanen. Keluwesan pada aturan, inovasi, kreatifitas, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas selalu menjadi pendorong untuk terciptanya pemerintahan yang bergaya wirausaha selama tidak bertentangan dengan misi yang diemban organisasi.

Pengembangan jiwa serta spirit kewirausahaan dalam

budaya kerja menjadi pendorong dan motivasi bagi aparat birokrasi. Salah satu strategi dalam mengembangkan kewirausahaan adalah strategi budaya. Strategi ini dilakukan dengan mengubah kebiasaan, menyentuh perasaan dan mengubah pikiran atau pandangan seseorang terhadap suatu hal. Mengembangkan bentuk dan sifat komunikasi dua arah dan terbuka dalam suasana kerja yang kondusif adalah hal mutlak dalam sebuah organisasi. Pembentukan budaya komunikasi yang dua arah dan terbuka belumlah dikemba Hal ini dikarenakan pengembangan budaya merupakan suatu yang sangat sulit dan memerlukan waktu yang cukup lama.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disesuaikan dengan apa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, bahwa “Bagaimanakah Implementasi *Entrepreneur Government* Di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Gorontalo”, maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

1. Rendahnya pemahaman Pejabat Tentang *Entrepreneur Government* di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Gorontalo, sebagaimana ditunjukkan dengan rendahnya pemahaman dan pengetahuan tentang prinsip *customer oriented* (pemerintah yang berorientasi pada masyarakat). Adanya penolakan terhadap ide *citizen carter* (piagam warganegara) dan konsep *customer choise* (pilihan pelanggan) dalam hal pelayanan publik. Selanjutnya mengenai konsep efisiensi anggaran, konsep inovatif dan kreatif, konsep kompetitif masih banyak pegawai yang memahaminya dengan baik, sehingga yang perlu dan harus dilakukan adalah mensosi-

alisasikannya kepada pegawai, dan hal ini butuh waktu yang lama, agar pegawai dapat memahaminya dengan baik.

2. Faktor-faktor yang menjelaskan *entrepreneur government* dalam birokrasi di Kabupaten Gorontalo, bila ditinjau dari pengetahuan dan sikap pejabat terhadap konsep ini belum begitu banyak yang memahaminya, masih terbatas pada pejabat saja dan masih ada keragu-raguan dari para pejabat terhadap konsep ini, juga rendahnya kompetensi mereka dalam menerapkan konsep-konsep pemerintahan wirausaha (*Entrepreneur Government*). Dilihat dari aspek budaya birokrasi yang sangat kental dengan budaya paternalistik dan perkoncoan dapat menjelaskan begitu sulitnya konsep ini untuk dikembangkan.

Saran

1. Perlunya bagi pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo untuk mengirimkan pejabat-pejabatnya sebanyak mungkin pada pendidikan formal khususnya S-2 yang mengajarkan tentang pemerintahan yang bergaya wirausaha (*Entrepreneur Government*) ataupun yang mengajarkan tentang konsep-konsep baru penyelenggaraan pemerintahan moderen saat ini.
2. Perlunya bagi pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo untuk mengikutsertakan pejabat-pejabatnya untuk mengikuti acara-acara seminar, lokakarya, simposium, workshop dan diklat-diklat yang mengajarkan dan mengenalkan konsep-konsep penyelenggaraan pemerintahan modren saat ini khususnya yang berkaitan dengan pemerintahan wirausaha (*Entrepreneur Government*).

3. Perlunya pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo untuk mengadakan acara sosialisasi kepada seluruh pejabat tentang pengetahuan yang berkenaan dengan kewirausahaan sektor publik, sehingga diperoleh pandangan dan pemahaman yang sama diantara pejabat dan memudahkan untuk melakukan tindakan aksi penerapan konsep-konsep ini.
4. Perlunya bagi pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo disemua tingkatan dan organisasi untuk mengubah budaya birokrasi yang paternalistik sedikit demi sedikit menuju birokrasi pelayanan, menghargai kompetensi, inovasi dan kreatifitas pegawainya. Mengembangkan sistem insentif bagi pegawai dalam rangka mendorong dan memacu motivasi dan kreatifitas pegawai untuk terus mengembangkan dan menambah pengetahuannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhan, Bungin. 2009. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Prenada Media Gorup.
- Caiden, Gerald.E, 1991. *Administrative Reform Comes of Age*, Newyork, N.Y, de Gruyter
- Dwiyanto, Agus, 1996. *Reinventing Government: Pokok-Pokok Pikiran dan Relevansinya di Indonesia*, Makalah Pada Pelatihan Manajemen Strategik bagi Direktur RSUD oleh Magister Manajemen Rumah Sakit, Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus, 2001. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Yogyakarta.
- Gafar Affan, (2000), *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Goodman, Jon, 1993. *Kewirausahaan Dalam Perusahaan, Manajemen*, No.89.
- Hariandja, Denny.B.C, 1999, *Birokrasi Nan Pongah, Belajar Dari Kegagalan Orde Baru*, Kanisius, Yogyakarta.
- Hughes, Edgar, Owen, 1994, *Public Management And Administration*, St. Martin's, United States of America.
- John M. Echols dan Hasan Shadily 1992. *Kompetensi Birokrat*
- Kamus Umum Politik Dan Hukum. 2010. Jala Permata Aksara : Jakarta
- Kao JJ, 1989, *Entrepreneurship Creativity and Organization*, Prentise-Hall, New Jersey.
- Lembaga Administrasi Negara (2003). *Pedoman Pelayanan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta
- Lupiyoadi, Rambat dan Hasan, Bakir, 1999. *Disain Struktur Yang Mendukung Kewirausahaan Organisasi*, Man dan Usaha Ind 07.
- Moenir, H.A.S, 2000, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Moleong, J, Lexy, 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mutis Thoby, 1995. *Kewirausahaan Yang Berproses*, Grassindo, Jakarta
- Nasution.S, 2006. *Metodologi Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Osborne, David dan Gaebler, Ted, 1995. *Mewirausahakan Birokrasi : mentransformasi semangat wirausaha ke dalam sektor publik jilid 2* (terjemahan), PPM, Jakarta.
- Osborne, David dan Plastrik, Peter, 2000. *Memangkas Birokrasi : lima strategi menuju pemerintahan wirausaha* (terjemahan), PPM, Jakarta.
- Rasyid, Ryaas, Muhammad, 2001, *Penjaga Hati Nurani Pemerintahan*. PUSKAP MIPI, Jakarta.
- Rush, Michael dan Althoff Phillip, 2000, *Pengantar Sosiologi Politik*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Siagian P, Sondang, 1996. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta

Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian, 1995, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.

Sugiyono, 2000. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Bandung: Rineka Cipta

Sugiyono, 2006. *Statistika untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta

Tjokrowinoto, Moeljarto, 1996. *Budaya Birokrasi Dalam Konteks Transformasi Struktural : Antara Harapan Dan Kenyataan*, JKAP, Vol.1 No.1, Yogyakarta.

Sumber Lain :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kantor
Pelayanan Terpadu Kabupaten Gorontalo

Keputusan Bupati Gorontalo Nomor 902 Tahun 2003 tentang pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Gorontalo